

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

(Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2022/PN Liw)

Oleh

MARVELINO ARKAN HAIDAR

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Penggelapan berdasarkan pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya akan barang itu disebabkan karena adanya suatu hubungan kerja atau karena mata pencarian atau mendapat upah. Permasalahan penelitian bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw? Dan apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Liw. telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Marvelino Arkan Haidar

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa, dengan cara melalui wawancara guna mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut adalah: Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan 2 (dua) tahun pidana penjara sudah tepat dikarenakan telah memenuhi aspek keadilan bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat dikarenakan sudah mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Hakim yang menangani tindak pidana penggelapan di masa mendatang untuk mempertimbangkan kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh pelaku. Sehingga semakin besar kerugian perusahaan maka makin besar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIC CONDITIONS OF JUDGES IN CRIMINAL IMMEDIATEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACEMENT IN OFFICE

(Study of Decision Number: 64/Pid.B/2022/PN Liw)

By

MARVELINO ARKAN HAIDAR

One category of property crime governed by the Criminal Code (KUHP) is embezzlement. There are a number of contributing elements that might lead to embezzlement crimes. As is well known, offences covered by Articles 372 to 377 of the Criminal Code (second book) include embezzlement. A sort of property crime is embezzlement. Crimes that take place in social settings are a phenomenon that keeps receiving attention. As previously mentioned, embezzlement is one of the crimes covered by the Criminal Code. According to Article 374 of the Criminal Code (KUHP), embezzlement is an act done by someone who has authority over the items due to an employment relationship, a source of income, or a wage. The issue with the study is What factors did the judge take into account when deciding how to punish the defendant in Decision Number 64/Pid.B/2022/PN.Liw? And does the judge's sentence in Decision Number 64/Pid.B/2022/PN.Liw serve the intended objective of punishment?

Empirical Law, a strategy that involves direct analysis of issues related to the law and linked to the standards or provisions applicable in the field, was used as the research

Marvelino Arkan Haidar

methodology. This. To find out what factors are considered by the panel of judges in imposing punishment in embezzlement cases, this research was conducted at the Liwa District Court by conducting interviews. Based on the analysis and research findings, there are: By considering the aggravating and mitigating circumstances, the decision of the Panel of Judges to impose a sentence of 2 (two) years imprisonment is appropriate because it has fulfilled a sense of justice for the perpetrator, victim and society.

This study suggests that future embezzlement criminal judges should consider the commercial losses incurred by the defendant. Therefore, the severity of the punishment for the perpetrator of office theft will depend on how much the company has lost.

Keywords: Judge Considerations, Embezzlement in Office, Criminal Acts